

Nama : Rafifa Tu Zakia

NPM : 2213031044

Studi Kasus Ekonomi Industri Pertemuan 9

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawab :

Kebijakan *Making Indonesia 4.0* belum berhasil mendorong pertumbuhan industri prioritas karena beberapa faktor utama. Pertama, kebijakan ini lebih menekankan digitalisasi dan otomasi industri tanpa memperhatikan kesiapan infrastruktur, tenaga kerja, serta kemampuan teknologi industri nasional. Akibatnya, banyak pelaku industri, khususnya UMKM, tidak mampu mengadopsi teknologi 4.0 karena keterbatasan modal dan keahlian. Kedua, lemahnya koordinasi antar lembaga dan inkonsistensi kebijakan membuat implementasi tidak berjalan efektif. Programnya bersifat seremonial dan tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Ketiga, kebijakan ini kurang memperhatikan kondisi fundamental sektor manufaktur yang masih menghadapi biaya logistik tinggi, ketergantungan impor bahan baku, dan lemahnya rantai pasok lokal. Berdasarkan teori kebijakan industri Rodrik dan Lall, intervensi pemerintah seharusnya bersifat selektif, fokus pada pembangunan kapabilitas industri dasar, serta melibatkan sektor swasta secara aktif bukan hanya menetapkan target teknologi tinggi tanpa fondasi yang kuat.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawab :

Vietnam berhasil memperkuat sektor manufakturnya melalui kebijakan yang pro-investasi dan berorientasi ekspor. Negara ini membuka diri terhadap investasi asing dengan regulasi sederhana, insentif fiskal yang pasti, serta infrastruktur logistik yang efisien. Fokusnya bukan pada teknologi tinggi secara langsung, melainkan pada penguatan kapasitas produksi dan integrasi ke rantai pasok global. Sementara itu, Korea Selatan menggunakan pendekatan berbeda: pemerintah berperan aktif memilih sektor strategis, memberikan

subsidi terarah, serta mengontrol insentif melalui lembaga perencana yang kuat. Pemerintah Korea juga menuntut *transfer teknologi* dan *R&D domestik* dari perusahaan yang menerima dukungan. Perbedaan utama dengan Indonesia terletak pada konsistensi kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan kemampuan pemerintah untuk mengontrol implementasi serta menuntut hasil konkret dari intervensi industri.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawab :

Kebijakan alternatif yang lebih kontekstual bagi Indonesia perlu berfokus pada *pembangunan kapabilitas industri nasional sebelum digitalisasi penuh*. Pemerintah harus memperkuat industri padat karya dan menengah melalui program *upgrading* teknologi, pelatihan tenaga kerja industri, serta insentif berbasis kinerja. FDI perlu diarahkan dengan syarat transfer teknologi dan kemitraan dengan pelaku lokal. Pemerintah juga perlu membentuk badan koordinasi lintas kementerian yang memiliki kewenangan penganggaran dan evaluasi kebijakan industri agar tidak tumpang tindih. Instrumen yang digunakan antara lain *matching grants* untuk modernisasi mesin, kredit bersubsidi bagi industri kecil-menengah, *tax holiday* bersyarat, dan *public procurement* untuk mendorong permintaan produk lokal. Rasionalnya, kebijakan seperti ini menutup kesenjangan kapabilitas industri, memperkuat rantai pasok nasional, dan memastikan transformasi industri terjadi secara bertahap dan inklusif, sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan deindustrialisasi dini.